

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chomzah, Ali Achmad, 2002, *Hukum Pertanahan*. Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Harsono, Boedi. 2007, *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hermit, Herman, 2009, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah*, Maju Mundur, Bandung.
- Heriyadi, Joko dkk, 2012. *Pemanfaatan Database Untuk Kegiatan Pelayanan di Badan Pertanahan Nasional*, Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor.
- Marzuki, Peter Hahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mohammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peranginangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum Cet 4*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, R. Wijono, 1984, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Santono, Urip, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Cetakan 2*, Kencana, Jakarta.
- Sihombing, Irene Eka, 2005, *Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Peneliti Tanpa Penerbit*, Yogyakarta.

Sutedi, Adrian, 2006, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Cipta Jaya, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Lembaran Negara Nomor 1960104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tarif Baru PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

3. Jurnal/Makalah/Tesis

Puspa, Dewi Zamrah, "Urgensi Pengecekan Sertipikat Dalam Proses Pembebanan Hak Tanggungan", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

Hendra, Rahmat, "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Tanah Dalam Kaitan Dengan Pembatalan Sertifikat Oleh Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1.

Makarunggala, Ratu Ester Damaris, "Fungsi Pengecekan Sertipikat Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2016.

Heriyadi, Joko, Syafriman, "Pemanfaatan Database Untuk Kegiatan Pelayanan di Badan Pertanahan Nasional", Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor, 2012.

4. Internet

A.A. Sri Astiti, "Inovasi Layanan Pertanahan BPN", <http://inovasi.lan.go.id>, diakses pada tanggal 11 September 2017, pukul 14.30 WIB.

Sandy Indra Pratama, "Ombudsman Sebut Tiga Lembaga dengan Pelayanan Terburuk", <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 11 September 2017, pukul 14.30 WIB.

Komputerisasi Layanan Pertanahan, <http://www.bpn.go.id>, diakses pada tanggal 08 Januari 2018, pukul 21.30 WIB.

Urbanindo Admin, "Cara Mengetahui Keaslian Sertifikat Tanah", <https://blog.urbanindo.com>, diakses pada tanggal 11 September 2017, pukul 12.20 WIB.